

# **LAPORAN KINERJA (LKj)**

## **INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT**

### **TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**INSPEKTORAT**  
**2022**

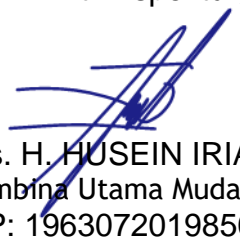
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggungjawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2021. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Pelaihari, 14 Maret 2022

Plt. Inspektur,



Drs. H. HUSEIN IRIANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 196307201985031015

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 dan berbagai capaian strategis tercermin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 3 program, 11 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2021 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan. Terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tidak mencapai target, dan kedepan pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan lebih ditingkatkan.

Pencapaian target kinerja merupakan gambaran bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pembinaan pengawasan yang merupakan komitmen bersama atas keterlibatan secara aktif dari seluruh unsur APIP, Pimpinan dan semua SKPD dalam rangka meningkatkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tetapi capaian kinerja tahun 2021 masih perlu peningkatan terutama dukungan para APIP dalam rangka penguatan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal yang diharapkan semakin profesional dan kompeten serta mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi, mampu berperan sebagai motivator dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menjadi inisiator, kreator dan inovator perubahan bagi lingkungannya sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

1. KATA PENGANTAR	i
2. IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
3. DAFTAR ISI	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	3
D. Produk dan Layanan	4
E. Sistematika Penyajian	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Visi RPJMD	7
B. Misi RPJMD	7
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
D. Indikator Kinerja Utama	13
E. Perjanjian Kinerja	13
F. Program dan Kegiatan	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	19
1. Sasaran RPJMD	19
2. Eselon II (Inspektur)	23
3. Eselon III (Inspektur Pembantu)	26
4. Eselon III (Sekretaris)	44
a. Eselon IV (Kasubbag)	55
B. Akuntabilitas Keuangan	73
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020	73
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	76
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2021	79
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan	82
B. Strategi Peningkatan Kerja	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2021
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal tersebut, maka sasaran program/kegiatan tahun 2021 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya berupa konsultasi, asistensi dan sosialisasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

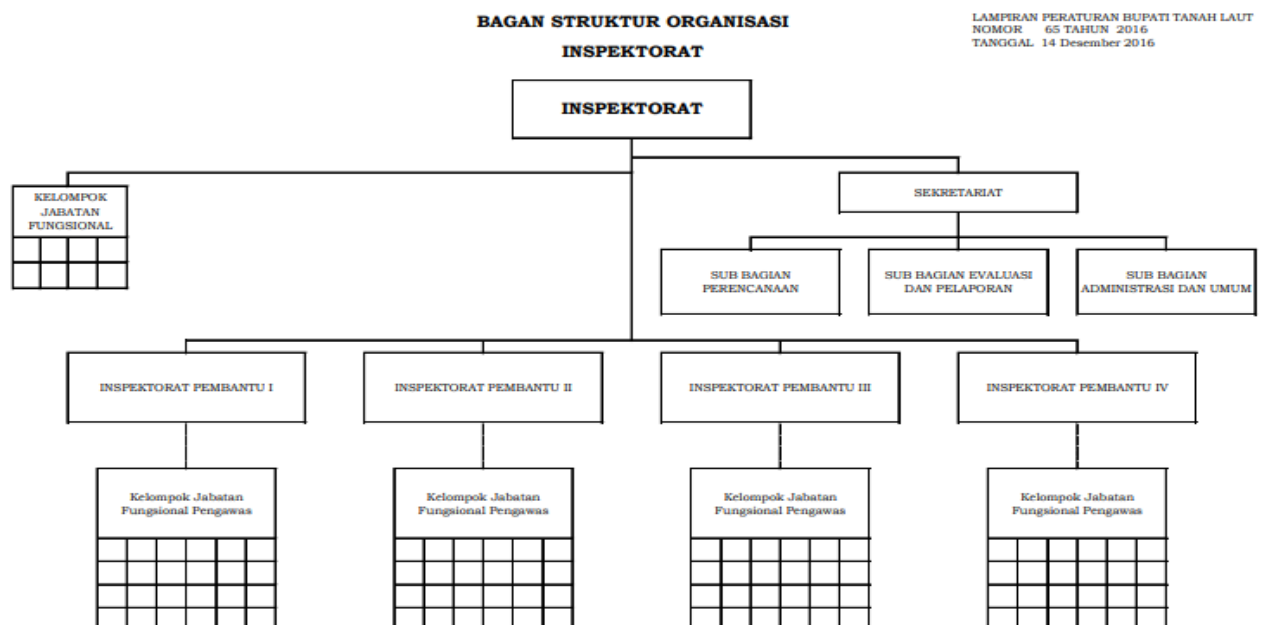
Laporan Kinerja (LKj) SKPD Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## B. Struktur Organisasi Tugas Dan Fungsi (Bagan SOTK)

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur bertanggungjawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur didukung oleh 1 Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu, 3 orang Kasubbag dan Jabatan Fungsional Auditor serta Jabatan Fungsional P2UPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT



### C. Isu Strategis

Guna mendukung semangat reformasi pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur yang profesional serta mampu melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* perlunya melihat menelaah dan mengimplementasikan isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Isu strategis yang terkait dengan pengawasan antara lain:

- a. Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- b. Rencana Aksi Daerah dalam Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).
- c. Mengawal pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
- d. Pengawasan mengguna rencana Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit Plan*)
- e. Evaluasi terhadap Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup SKPD melalui satgas SPIP.
- f. Pengadministrasian/ penatausahaan Asset tugas Pembantuan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan diperlukan perhatian khusus dan fokus dalam pemeriksaan tugas pembantuan.
- g. Cepat tanggap dalam menangani setiap kasus/ isu yang cukup penting yang menyita perhatian pemerintah daerah.
- h. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemantauan pelaksanaan tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.
- j. Penyelenggaraan Korsupgah bekerjasama dengan KPK.
- k. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP.
- l. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, dan
- m. Zona Integritas.
- n. Pemeriksaan Pelaksanaan Anggaran Terkait Vaksin Covid-19

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kewenangan kegiatan pengawasan Inspektorat adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Regulasi ini merupakan tantangan besar bagi Inspektorat dalam mengemban **kewenangan** dan **independensi** yang lebih dari sebelumnya dalam melakukan kegiatan pengawasan.



#### D. Produk Layanan (Hasil Produk Layanan SKPD Sesuai Topoksi)

Sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat dan peran APIP yaitu sebagai *quality assurance* dan *consulting*, maka kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya melalui :

1. Pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit barang/jasa, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Kinerja Pemerintah Daerah serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Reviu RKPD, Perubahan RKPD, KUA/PPAS Tahun Anggaran, Reviu Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran, RKA-SKPD & RKA PPKD, Perubahan RKA-SKPD & RKA PPKD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Reviu Dana DAK;
2. Pengawasan pengaduan masyarakat/ Instansi Pemerintah;
3. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemberian rekomendasi *blacklist* kepada penyedia jasa;
5. Pemberian bimbingan teknis serta konsultasi;
6. Reviu Reformasi Birokrasi;
7. Reviu atas pemerapan Maturitas SPIP di Kabupaten Tanah Laut;
8. Pemberian Jasa Konsultasi dan fasilitasi.

Dari kegiatan *assurance* dan *consulting* tersebut diharapkan SKPD dapat meningkatkan kinerja organisasinya serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian /lembaga /pemerintah daerah melakukan revidi atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri /Pimpinan Lembaga /Gubernur /Bupati /Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, kini tidak bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2021 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/3317/ORG tanggal 28 Desember 2021 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2021, sebagai berikut :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi :

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

### **Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja**

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

1. Sasaran RPJMD
2. Eselon II (Inspektur)
3. Eselon III (Inspektur Pembantu)
4. Eselon III (Sekretaris)
  - a. Eselon IV (Kasubbag)

### **B. Akuntabilitas Keuangan**

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

### **B. Strategi Peningkatan Kerja**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2021 bertanda tangan
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Visi RPJMD**

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi (menyesuaikan dengan Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut).

#### **B. Misi RPJMD**

Misi SKPD merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi RPJMD yaitu : **MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*Good Governance*)**” (menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut).

#### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja terhadap indikator- indikator Inspektorat sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Inspektorat Tahun 2021.

Rumusan tujuan sebagaimana Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya Tata Kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien
3. Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai;

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran strategis		Indikator kinerja	Target
				ESELON 2			
1	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Efektifitas sistem Pengawasan	100%	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	1	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%
2	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	2	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	3,2
				ESELON 3 (IRBAN)			
1	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Efektifitas sistem Pengawasan	100%	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	1	Persentase tercapainya PKPT	100%
					2	Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	1	Persentase Pengaduan Masyarakat/Instansi yang ditindaklanjuti	100%
				Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	1	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti : - Internal - Eksternal	70 %
2	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik		Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1	Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%
					2	Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%
				Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)
				Meningkatnya unit pelayanan publik sebagai zona intergitas WBK		Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran strategis		Indikator kinerja	Target
				ESELON 2			
				ESELON 3 (SEKRETARIS)			
1	Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai	Persentase meningkatnya kompetensi pengawas pemerintahan, auditor dan pegawai lainnya	100%	Meningkatnya kualitas SDM Pengawasan	1	Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat	100%
					2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
					3	Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan	100%
2	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100%	Meningkatnya kelancaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%
					2	Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%
				Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	1	Predikat Sakip	75 (BB)
					2	Nilai RB SKPD	75 (BB)
					3	Nilai ZI SKPD	75 (BB)

Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun)

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja pd awal periode RPJMD	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja pd akhir periode RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Efektifitas sistem Pengawasan	100%	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat keuangan	40 SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya material	5%	5%	5%	5%	7%	7% dari hasil SKPD/ Desa dg temuan yg sifatnya keuangan
			100%	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan asset tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	hasil reuiu laporan keuangan untuk mendukung Opini 100%
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Pesentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100% (8 aduan)	100%	100%	100%	100%	100%	Semua aduan masyarakat ditangani 100%
				Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (eksternal dan Internal)	Jumlah rekomendasi yang belum tuntas di TL : 698	70%	72%	75%	80%	85%	

2	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik		Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	Level 3,1	Level 3,2	Level 3,3	Level 3,4	Level 3,5	Level 3,5	Level 3,5
				Meningkatnya hasil Evaluasi RB dan ZI SKPD	Persentase Hasil Evaluasi RB SKPD dengan katagori B	CC (Memadai)	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
					Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	BB
				Meningkatnya unit pelayanan publik sebagai zona intergitas WBK	Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	3 SKPD	15 SKPD
4	Terwujudnya sumber daya aparatur pengawasan yang berbasis kompetensi dengan jumlah memadai	Persentase meningkatnya kompetensi pengawas pemerintahan, auditor dan pegawai lainnya	100%	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	Persentase pemenuhan SDM pengawasan yang bersertifikat	100% (10 orang)	100% (10 orang)	100% (10 orang)	100% (10 orang)	100% (10 orang)	100% (10 orang )	100% (40 orang)



					Tingkat kapabilitas APIP	2+ hasil penilaian BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
					Persentase perencanaan diklat aparatur yang direalisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua perencanaan diklat terealisasi
4	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase tata kelola administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan yang tertib	100%	Meningkatnya kelancaran Penatausahaan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	Predikat SAKIP	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	BB
					Nilai RB SKPD	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	BB
					Nilai ZI SKPD	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	BB

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 November 2019, adalah sebagai berikut :

**Tabel Indikator Kinerja Utama**

NO	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase menurunnya Temuan hasil pengawasan bersipat keuangan	$\frac{\sum \text{Temuan temuan keuangan th n} - (\text{Th n-1})}{\sum \text{Temuan SKPD diperiksa th n-1}} \times 100\%$	Inspektur, Inspektur Pembantu, Subbag Evlap
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	$\frac{\sum \text{SKPD dengan Maturitas SPIP minimal} \times 3.0^*}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Inspektur, Inspektur Pembantu, Subbag Perencanaan, Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Subbag Administrasi Umum

#### E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan perjanjian dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh Inspektur, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT**

**ESSELON II (INSPEKTUR)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	Level 3,4

**ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	100%
		Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal</li> <li>• Eksternal</li> </ul>	70% 70%
4	Meningkatnya hasil Reviu RB, ZI	Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%
		Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)
6	Meningkatnya unit pelayanan publik sebagai zona intergitas WBK	Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD

**ESSELON III (SEKRETARIS)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu 2. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100% 100%
2	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	1. Predikat SAKIP 2. Nilai RB 3. Nilai ZI	A 75 (BB) 75 (BB)
3	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	1. Persentase Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat 2. Tingkat Kapabilitas APIP 3. Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100% Level 3 100%

**ESSELON IV ( KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi temuan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen laporan hasil pemeriksaan	60 Dokumen
2	Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi oleh KPK	Jumlah kegiatan koordinasi dan supervise pencegahan korupsi oleh KPK yang difasilitasi	3 Laporan
3	Melaksanakan Fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli	Jumlah kegiatan Satgas Saber Pungli yang difasilitasi	4 Laporan
4	Melaksanakan monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah monitoring tindak lanjut hasil temuan Pengawasan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan (eksternal dan internal)	60 Obrik
5	Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang difasilitasi	2 Laporan
6	Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	10 SKPD
7	Mengumpulkan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	Jumlah data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	170 dokumen

**ESSELON IV ( KASUBAG ADMINISTRASI UMUM)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melakukan layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	8 Dok
2	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	6 Dok
3	Melaksanakan Pemeliharaan Saprass	Jumlah Saprass, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	110 buah
4	Melaksanakan Pengelolaan Arsip	Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	1800 dok
5	Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat	24 org

**ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN)**

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 Dokumen
2.	Melaksanakan Fasilitas PKPT	Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT	102 LHP
3.	Melaksanakan Fasilitas reuiv LKPD	Laporan Hasil Reuiv LKPD Sesuai SAP	1 Dok
4.	Melaksanakan Fasilitas Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	40 Dokumen
5.	Melakukan Fasilitas Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasiltasi	5 Kasus
6.	Melaksanakan Fasilitas Evaluasi RB dan ZI	Jumlah SKPD yang dievaluasi RB dan ZI	RB 40 SKPD ZI 10 SKPD

**F. Program dan Kegiatan**

Dalam mendukung visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. Pada Tahun 2021 sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD, Inspektorat mempunyai 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

## **I. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  5. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
  17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  20. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  21. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  22. Reviu Laporan Kinerja
  23. Reviu Laporan Keuangan

- 24. Pengawasan Desa
- 25. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 26. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

### **III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

- 10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
- 27. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- 11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- 28. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- 29. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 30. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 31. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2021 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2021.

##### 1. Sasaran RPJMD

Inspektorat sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini Inspektorat mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan pengawasan. Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Inspektorat merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke 3 RPJMD yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), sebagai berikut:

**Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,4	2,8	82,35 %
		2	Nilai Reformasi Birokrasi	75	34,14	45,52%
		3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		4	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)	65,88 (B)	92.5%



Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari capaian kinerja tersebut di atas adalah:

#### **1.1 Indikator : Tingkat Maturitas SPIP, dengan Target Level 3,4**

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian baseline SKPD sebagai bagian dari langkah konkrit menuju peningkatan nilai maturitas SPIP, dari hasil penilaian baseline maturitas SPIP terhadap 10 SKPD (Inspektorat, Dinas Peternakan, Bappeda, Disnakerin, DPRKPLH, Kesbangpol, Dinas Pariwisata, DKPP, Diskopdag, BPKAD) didapat nilai sebesar 2,82 (mengalami penurunan dari capaian sebelumnya sebesar 10,75%). Sedangkan penilaian secara rinci terhadap SKPD yang mewakili akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan diharapkan pada penilaian ini dapat mengalami peningkatan (sesuai target).

#### **1.2 Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi, dengan Target 75**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance dan melakukan perubahan yang mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia, tujuan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance).

Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap 40 (empat puluh) SKPD dan 1 (satu) RSUD H.Boejasin yang meliputi 8 (delapan) area Perubahan, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Akuntabilitas Kinerja dan
- 8) Kualitas Pelayanan Publik.

Berikut adalah data hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021 terhadap 40 SKPD:

**Tabel Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

Jumlah SKPD	Kategori	Persentase	Interprestasi
5	AA	9,75	Istimewa
8	A	9,75	Sangat Baik
8	BB	14,63	Baik
2	B	19,51	Cukup Baik
5	CC	7,3	Cukup
6	C	17	Buruk
7	D	21,95	Sangat Buruk

Sesuai Target RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 - 2023 adalah 75. (BB), Sehingga untuk capaian tahun 2021 adalah 51,22% yang terdiri atas 21 (dua puluh satu SKPD) dengan kriteria Baik, Bangat Baik dan Istimewa.

### **1.3 Indikator : Level Kapabilitas APIP, dengan Target Level 3**

Dalam rangka meningkatkan kinerja APIP di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terutama terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang meliputi Unsur Kapasitas, Kewenangan dan Kompetensi SDM, maka penilaian Kapabilitas APIP telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan' Sesuai hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai Level 3. (100%)

Untuk Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka penyusunan PKPT telah berbasis kinerja, dan sesuai hasil *Quality Assurance* terhadap Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat telah mencapai Level 3. (100%)

### **1.4 Indikator : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"**

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sisten Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIP nya dan mendorong adanya peningkatan kinerja juga untuk melihat capaian target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan di Rencana Strategis SKPD maka dilakukan evaluasi.

Sedangkan Tahun 2021 hasil evaluasi SAKIP dari 40 SKPD didapat 26 (dua puluh enam) SKPD dengan kriteria Memuaskan dan Sangat Baik (mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 29,72%) dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Jumlah SKPD	Kategori	Persentase	Interprestasi
9	A	22,5%	Memuaskan
17	BB	42,5%	Sangat Baik
10	B	25%	Baik
3	CC	7,5%	Cukup (memadai)
1	C	2,5%	Kurang

*Sumber data : hasil evaluasi SAKIP tahun 2021*

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten adalah melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan disetiap awal tahun dengan maksud untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang handal , akurat dan berkualitas.

Selain melakukan Reviu Inspektorat juga melakukan Evaluasi terhadap 40 SAKIP SKPD dengan maksud untuk :

- 1) memperoleh informasi dan menilai tentang Implementasi SAKIP,
- 2) memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan,
- 3) meningkatkan pemanfaatan Sumber daya yang tersedia,
- 4) peningkatan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Hasil dari evaluasi SAKIP SKPD diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menunjang peningkatan nilai SAKIP Kabupaten.

Kegiatan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah untuk tahun 2021 akan dilakukan pada tahun 2022, sehingga untuk realisasinya belum ada (dalam proses penilaian KemenPANRB).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah berperan melakukan penilaian mandiri dan pendampingan terhadap SKPD dalam penyusunan SAKIP. Hal ini sangat penting, karena hasil nilai SAKIP SKPD adalah menentukan nilai SAKIP Kabupaten (Daerah).

**Tabel Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan 2021**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,16	2,8	turun
2	Nilai Reformasi Birokrasi	34,14 %	51,22%	Meningkat

3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
4	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	92,5%	65%	Dalam proses

## 2. Sasaran Eselon II (Inspektur Kabupaten Tanah Laut)

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sasaran Strategis sebagaimana Sasaran pada Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 yang telah dirumuskan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	19,42%	Hasil temuan menurun 388,4%
2.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,4	2,8	82,35%

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan**

**Indikator : Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan dengan target 5%.**

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT Tahun 2020 melalui Audit Pengelolaan Dana Desa sebanyak 26 Desa dan Pengelolaan Dana BOS SMP dan SD 40 Sekolah, sedangkan untuk Pengawasan SKPD berupa Audit Kinerja.

Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat temuan yang bersifat keuangan sebanyak 172 kejadian atau dengan total nilai sebesar RP1.122.951.662,79 sehingga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 34.5 %, artinya indikator ini tidak tercapai target merupakan temuan atas hasil pemeriksaaan pada Desa dan Sekolah-sekolah.

Sedangkan untuk Tahun 2021 telah dilaksanakan pengawasan sesuai dengan PKPT Tahun 2021 untuk SKPD tidak dilakukan audit keuangan tetapi melalui Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu.

Sedangkan untuk rekomendasi yang bersifat keuangan sesuai PKPT yang dilakukan sebanyak 43 obrik terdiri atas pemeriksaan Desa sebanyak 11 Desa dan Pengelolaan Dana BOS SMP dan SD 32 Sekolah, dengan temuan sebanyak 110 Kejadian dengan Total Nilai Rp602.938.940,16 sehingga mengalami kenaikan persentase penurunan Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan sebesar 18,64% (dihitung dari total penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 34,85%. Tabel nilai temuan dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel Nilai Temuan**

Nomor	tahun	Keuangan (Rp)	obrik	%
1	2020	1.122.951.662,79	66	34,85
2	2021	602.938.940,16	43	53,49

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Pengelolaan Keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat Keuangan	5%	19,42%	388,4

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja pengawasan yang bersifat keuangan dengan target sebesar 5% mengalami kenaikan persentase dibanding tahun sebelumnya, yaitu tercapai sebesar 19,42%, (hal ini disebabkan pada tahun 2021 pengawasan obrik dilakukan pada dana desa dan dana BOS yang belum mentaati terhadap aturan yang berlaku terutama dalam pengelolaan anggaran.

Kendala-kendala dalam mencapai target Indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya jadwal untuk pengawasan yang berbarengan dengan jadwal dari pusat yang harus segera diselesaikan;
- 2) Belum maksimalnya pemahaman terutama pada Aparat desa dan Tim BOS Sekolah terkait pentingnya Audit.

Solusi:

- 1) Membuat Peta Pengawasan berdasarkan Penilaian Berbasis Resiko dari SKPD.
- 2) Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
- 3) Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Aparat Desa.

- 4) Dilaksanakan entry briefing dengan obrik.
- 5) Melakukan koordinasi dan menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sewaktu ekspose temuan BOS.

Rencana Aksi :

- a. Memberikan pemahaman kepada aparat desa dan Tim BOS Sekolah melalui Bimtek dan konsultasi.
- b. Koordinasi dengan DPMD terkait temuan pengawasan Desa;
- c. Membuat surat bebas temuan yang akan digunakan Kepala Desa untuk pencalonan berikutnya.

## **Sasaran 2 : Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD.**

**Indikator : Tingkat Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik, dengan Target 3,4**

Pada Tahun 2020 Penilaian Maturitas SPIP belum dilakukan penilaian dan masih dalam tahapan penyusunan Manajemen Resiko SKPD, sehingga target capaian 0%.

Sedangkan Pada tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian baseline SKPD sebagai bagian dari langkah konkrit menuju peningkatan nilai maturitas SPIP, dari hasil penilaian baseline maturitas SPIP terhadap 10 SKPD (Inspektorat, Dinas Peternakan, Bappeda, Disnakerin, DPRKPLH, Kesbangpol, Dinas Pariwisata, DKPP, Diskopdag, BPKAD) didapat nilai sebesar 2,82 (mengalami penurunan dari capaian sebelumnya sebesar 10,75%). Sedangkan penilaian secara rinci terhadap SKPD yang mewakili akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan diharapkan pada penilaian ini dapat mengalami peningkatan (sesuai target).

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pendampingan dan Asistensi dengan Sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal	Persentase Maturitas SPIP SKPD dengan Skor Baik	3,4	2,82	(82,35%)

Pada Tahun 2021 dalam rangka mendukung penilaian maturitas SPIP telah dilakukan kegiatan Risk Register (RR) di 40 SKPD yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.



*Kegiatan Risk Register Tahun 2021*

Kendala- Kendala dalam mencapai target Indikator ini yaitu:

1. Pemahaman terhadap Maturitas SPIP masih kurang, baik penilai ataupun SKPD;
2. Lambatnya SKPD untuk penyusunan Risk Register (RR) Tahun 2021.

Solusi:

1. Dilakukan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaliman Selatan untuk menyusun skala prioritas Risk Register (RR) SKPD;
2. Telah dilakukan koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan Risk Register (RR).

Rencana Aksi :

Penilaian dan penyusunan Maturitas SPIP SKPD dengan pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3. Eselon III (Inspektur Pembantu)**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah (Irbn) I, II, III, dan IV. Ke 4 Irbn tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama, adapun yang berbeda adalah pada wilayahnya yang menjadi binaan. Dari ke 4 Irbn tersebut dapat dirangkum capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis Eselon III (Inspektur Pembantu)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Efektivitas	1. Persentase tercapainya PKPT	100%	100%	100%

	perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	2. Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal</li> <li>• Eksternal</li> </ul>	70% 70%	39.64% 4.39%	56.62% 6.27%
4	Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1. Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%	51,22% (21 SKPD)	51,22%
		2. Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%	63,63% (7 SKPD)	63,63%
5	Meningkatnya hasil Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	75 (BB)	65%	65%
6	Meningkatnya SKPD sebagai zona intergitas WBK	Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	3 SKPD	-	-

Dengan uraian penjelasan sebagai berikut :

### **Sasaran 3 : Meningkatkan Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan.**

#### **Indikator 1 : Persentase tercapainya PKPT**

Pada Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pada tahun 2020 untuk melaksanakan kegiatan ini telah didukung melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan anggaran Rp.596.709.300.- dan terealisasi sebesar Rp 409.599.300.- (68.48%) sedangkan jumlah APIP yang mendukung kegiatan ini sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan ini telah didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp.589.418.870.- dan terealisasi sebesar



Rp.334.573.664.- (56.76%) sedangkan jumlah APIP yang mendukung kegiatan ini sebanyak 24 orang.

Bila dibanding tahun 2020 ada mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 26.39% sedangkan jumlah SDM APIP mengalami pengurangan

Nilai capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran indikator tersebut adalah melakukan pengawasan melalui pemeriksaan/ audit, reviu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya. Realisasi PKPT tahun 2021 berdasarkan hasil capaian sampai dengan triwulan IV Jumlah PKPT yang dapat direalisasikan sebesar 100% (43 obrik)

**Tabel Realisasi PKPT Tahun 2021**

NO	Uraian PKPT	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengawasan : - SKPD - Desa; - BOS; - Kinerja - Tujuan Tertentu (Riksus) - Pendahuluan ATT Barang Jasa - Investigasi - BTT/BTT Dana Covid - PKKN dan AI - Dana Bos Kinerja dan BOS Afirmasi - Pemeriksaan atas realisasi pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras tahun 2019 - Probit Audit - Penutupan Kas - Laporan Keuangan	- 11 32 1 5 40 2 1 2 1 1 1 1 40 1	- 11 32 1 5 40 2 1 2 1 1 1 40 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2	Reviu : - LKPD; - LPPD; - Laporan Kinerja PEMDA; - Dana DAK	40 40 40 13	40 40 40 13	100% 100% 100% 100%

	- Rancangan KUA dan Perubahan PPAS 2021	40	40	100%
	- RKA Perubahan 2021	40	40	100%
	- Rancangan KUA PPAS 2022	40	40	100%
	- RKA 2022	40	40	100%
	- Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2021	40	40	100%
	- Rancangan RKPD Tahun 2022	40	40	100%
3	Evaluasi/Pendampingan : - Sakip - RB - ZI	40 40 7	40 40 7	100% 100% 100%
4	Monitoring Belanja Tidak Terduga (BTT) - SKPD - Desa	1	1	100%
5	Pendampingan dana Belanja Tidak Terduga (BTT)	2	2	100%
6	Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	40	40	100%
7	Pemantauan Seleksi Kompetensi Dasar (CPNS)	1	1	100%
8	Pendampingan Risk Register	40	40	100%
9	Verifikasi LHKASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	100%

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana PKPT yang telah ditetapkan Tahun 2021, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 pada Badan/ Dinas, Kecamatan serta Kelurahan juga Desa dan melakukan pengawasan sesuai Mandatori dari Pusat. Dari Hasil pengawasan tersebut telah terbit Laporan Hasil Pengawasan sebanyak 115 buah, dengan target sebanyak 115 buah (100%)

**Tabel hasil PKPT**

Jumlah PKPT	Jumlah LHP terbit	Capaian
115	115	100%

*Sumber data : umum, 2021*

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah terbit sebanyak 115 dokumen tersebut telah disampaikan kepada obrik untuk dilakukan tindak lanjut.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengawasan tambahan sesuai

Mandatori Pusat yang belum masuk dalam PKPT sehingga program yang semestinya ke SKPD menjadi terhambat.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

1. Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
2. Telah dilaksanakan entry briefing dengan obrik.
3. Membuat Berita Acara kesepakatan kepada SKPD untuk batas waktu penyampaian data untuk pemeriksaan.

Rencana Aksi :

1. Melakukan Revisi PKPT tahun 2021
2. Memasukan kegiatan mandatori pusat kedalam PKPT untuk pengawasan tahun berikutnya



*Kegiatan cek fisik lapangan 2021*



*Kegiatan ekspose temuan hasil pengawasan*

## **Indikator 2 : Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan disampaikan ke BPK RI untuk mendapat Opini, dengan Laporan Keuangan SKPD sebagai pendukung sebanyak 40.

Pada tahun 2020 Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan anggaran Rp.596.709.300.- dan terealisasi sebesar Rp.409.599.300.- (68.48%) sedangkan jumlah APIP dan yang mendukung kegiatan ini sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 untuk melaksanakan kegiatan ini telah didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp.589.418.870.- dan terealisasi sebesar Rp.334.573.664.- (56.76%) sedangkan jumlah APIP dan yang mendukung kegiatan ini sebanyak 24 orang.

Bila dibanding tahun 2020 ada mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 1.01% sedangkan jumlah SDM APIP mengalami pengurangan.

Nilai capaian indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase SKPD dengan Pengelolaan keuangan dan asset yang tertib	100%	100%	100%

Sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 sebanyak 40 SKPD. Dari kegiatan tersebut setelah dilakukan penelusuran angka-angka pada laporan keuangan SKPD sebagai pendukung laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai SAP, dan untuk pengelolaan Aset juga telah sesuai aturan.

Dari hasil kegiatan reviu diharapkan pengelolaan keuangan dan aset di SKPD selain sesuai SAP juga dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Opini BPK-RI diharapkan WTP.

Berikut hasil evaluasi terhadap SKPD dengan pengelolaan keuangan dan aset yang tertib.



### Data hasil Reviu LKPD SKPD

Jumlah SKPD	Data Reviu	Keterangan
29 SKPD	- Laporan keuangan - Aset	sesuai
11 Kecamatan	Sda	sesuai
5 Kelurahan	Sda	sesuai



*Kegiatan Reviu LKPD Th. 2021*

Berikut data hasil opini BPK atas hasil Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020.

**Tabel perolehan opini BPK-RI**

Tahun	Opini
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	Dalam proses

*Sumber data, evlap, 2021*

### **Sasaran 4 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**

#### **Indikator : Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan kegiatan pengawasan khusus atas aduan masyarakat dan Instansi yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pada tahun 2020 untuk Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah tidak dianggarkan. Kegiatan Kasus yang masuk ada 8 (delapan) dan telah ditindaklanjuti semua (100%). Untuk mencapai kegiatan penyelesaian aduan didukung dengan jumlah APIP sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 Kegiatan ini didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan Pagu anggaran Rp56.040.500,- dengan realisasi Rp10.600.050,- (18.91%). Kegiatan Kasus Tahun 2021 yang masuk ada 5 (lima) buah pengaduan berupa pengaduan disiplin pegawai dan pengaduan desa dan telah ditindaklanjuti semua (100%). Untuk mencapai kegiatan penyelesaian aduan masyarakat didukung dengan jumlah APIP sebanyak 24 orang.

Nilai capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Dalam rangka penyelesaian tersebut rekomendasi telah disampaikan ke SKPD terkait yang akan digunakan sebagai dasar Pertimbangan Majelis. Dan Inspektorat telah memantau terkait tindak lanjut tersebut, dari hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan penjatuhan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2021 kasus pengaduan masyarakat masuk sebanyak 5 aduan dan semuanya telah ditindaklanjuti (100%) Yaitu :

1. Bapenda kasus terkait hukuman disiplin ASN;
2. Pengaduan Masyarakat Desa Kalibesar Kecamatan Kurau;
3. Pengaduan Masyarakat Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan;
4. Pengaduan Masyarakat Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap;
5. Pengaduan Masyarakat Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari;

#### **Sasaran 5 : Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan**

**Indikator : Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti Internal dan Eksternal.**

**Tahun 2020** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan

Pagu anggaran Rp106.040.000,- dengan realisasi Rp72.680.900,- (68.54%) dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM untuk melaksanakan tindak lanjut sebanyak 5 orang dari sub bagian evaluasi dan pelaporan dan APIP sebanyak 24 orang .

a) Internal

Dari hasil pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 terdapat rekomendasi sebanyak 172 buah, yang telah tuntas ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 47 buah (27,33%) dan yang belum tuntas sebanyak 125 buah (72,67%)

b) Eksternal

Hasil penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan Eksternal tahun 2020 berdasarkan Statistik Rekomendasi sebanyak 29.87% dari jumlah total temuan 77 buah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 23 temuan.

**Tabel Hasil Tindak Lanjut tahun 2020**

No.	Data Temuan	Jumlah temuan	Tuntas	Belum tuntas	%
1	Internal	172	47	125	27,33
2	Eksternal	77	23	54	29,87

Sedangkan pada **tahun 2021** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pagu anggaran Rp119,573,806,- dengan realisasi Rp54,314,430,- (45.42%) dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM untuk melaksanakan tindak lanjut sebanyak 5 orang dari sub bagian evaluasi dan pelaporan dan APIP sebanyak 24 orang.

Bila dibanding tahun 2020 ada mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 0.89%.

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan	Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> <li>Internal</li> <li>Eksternal</li> </ul>	70% 70%	39.64% 4.39%	56.62% 6.27%

172 (seratus tujuh puluh dua) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal

a. Internal

Dari hasil pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terdapat rekomendasi sebanyak 280 buah, yang telah tuntas ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 111 buah (39,64%) dan yang belum tuntas sebanyak 169 buah (60,35%)

b. Eksternal

Hasil penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan Eksternal tahun 2021 berdasarkan Statistik Rekomendasi sebanyak 4,39% dari jumlah total temuan 91 buah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 4 rekomendasi.

**Tabel Hasil Tindak Lanjut tahun 2021**

No.	Data Temuan	Jumlah temuan	Tuntas	Belum tuntas	%
1	Internal	280	111	169	39,64
2	Eksternal	91	4	87	4,39



*Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2021*

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Kurangnya komitmen SKPD/Desa untuk menindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan.
2. Adanya temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti, hal ini disebabkan yang bersangkutan yang terkena rekomendasi meninggal dunia.



3. Petugas yang menindaklanjuti temuan tersebut dipindah tugaskan ke instansi lain.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

1. Dibentuknya program 60 hari untuk pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) terkait LKPD.
2. Koordinasi, evaluasi berkala dan inventarisasi terhadap temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan Tim BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi.
3. Dibentuk Tim untuk mengintensifkan kegiatan tindak lanjut dalam menyelesaikan LHP.
4. Membuat Berita Acara kesepakatan kepada SKPD untuk batas waktu menyelesaikan tindak lanjut.
5. Telah dibentuk Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk penyelesaian tindak lanjut baik temuan Eksternal dan Internal.

Rencana Aksi :

1. Dibuat Surat Rekomendasi bagi SKPD yang akan pindah tugas;
2. Dibuat Surat Bebas Temuan bagi Kepala Desa yang akan mencalon kembali.

#### **Sasaran 6 : Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD.**

##### **Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik**

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya hasil evaluasi RB dan ZI SKPD	1. Persentase SKPD dengan Hasil Reviu RB Baik	100%	51,22% (21 SKPD)	51,22%
		2. Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	100%	63,63% (7 SKPD)	63,63%

**Pada** tahun **2020** untuk mencapai indikator ini dilakukan melalui kegiatan reviu Reformasi Birokrasi terhadap 40 (empat puluh) SKPD sampel dengan penilaian terhadap 8 (delapan) Area Perubahan, berikut table hasil penilaian SKPD:

**Tabel hasil evaluasi RB Tahun 2020**

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
4	AA	9,75	Istimewa
4	A	9,75	Sangat Baik
6	BB	14,63	Baik
8	B	19,51	Cukup Baik
3	CC	7,3	Cukup
7	C	17	Buruk
9	D	21,95	Sangat Buruk

*Sumber Data :hasil reviu tahun 2020*

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 pada 40 SKPD dan 1 RSUD H. Boejasin adalah 34,15 % yang terdiri atas 14 (empat belas SKPD) dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Istimewa. Berikut adalah data hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

Sedangkan pada **tahun 2021** Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap 40 (empat puluh) SKPD dan 1 (satu) RSUD H. Boejasin yang meliputi 8 (delapan) area Perubahan, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Akuntabilitas Kinerja dan
- 8) Kualitas Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021 pada 40 SKPD dan 1 RSUD H. Boejasin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu 51,22% yang terdiri atas 21 (dua puluh satu SKPD) dengan kriteria Baik, Sangat Baik dan Istimewa. Berikut adalah data hasil penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

**Tabel Hasil Evaluasi RB Tahun 2021**

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
5	AA	12.19	Istimewa
8	A	19.51	Sangat Baik
8	BB	19.51	Baik

2	B	4.87	Cukup Baik
5	CC	12.19	Cukup
6	C	14.63	Buruk
7	D	17.07	Sangat Buruk

*Sumber Data :hasil reviu tahun 2021*

Berdasarkan sampel SKPD yang dinilai, yang mencapai Presentase SKPD dengan hasil Reviu Reformasi Birokrasi Baik mencapai 21 SKPD atau (51,22% ) dengan kriteria Baik 8 SKPD, Sangat Baik 8 SKPD dan Istimewa 5 SKPD.

Kendala- Kendala dalam rangka penilaian RB :

1. Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
2. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
3. Kurangnya kompetensi SDM
4. Rendahnya budaya kerja
5. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal

Solusi :

1. Meningkatkan/memperbaiki Manajemen kinerja
2. Memperbaiki Manajemen SDM
3. Peningkatan SDM melalui Pelatihan
4. Meningkatkan budaya kerja
5. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Publik

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi antara lain:

- 1) Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan 8 (delapan) Area Perubahan.

## **Indikator 2 : Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik.**

Dalam rangka pelaksanaan Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Pencanaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga diikuti dengan Pencanaan dan Penunjukan SKPD yang terpilih sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kecamatan Pelaihari.

**Pada tahun 2020** telah dilakukan penilaian terhadap 10 SKPD yang telah

ditetapkan, Berdasarkan sampel 10 SKPD yang dinilai tersebut, terdapat 6 SKPD yang diusulkan ke Kementerian PANRB untuk penilaian. Pada bulan September 2020 terdapat 5 SKPD yang terpilih untuk dinilai, dan dari hasil penilain Kementerian PAN RB telah lolos sebagai Zona Integritas adalah **2 (dua) SKPD yaitu BKPSDM dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil**. Berikut hasil penilaian Zona Integritas terhadap 10 SKPD.

**Tabel Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>NILAI</b>
1	Inspektorat	88,43
2	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,14
3	Dinas Kesehatan	0
4	Dinas Perhubungan	0
5	Sekretariat Daerah	84,64
6	Badan Pengelola Keuangan dan Asset	0
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91,88
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,14
10	Kecamatan Pelaihari	87,29

**Pada tahun 2021** telah dilakukan penilaian terhadap 11 SKPD yang telah dicanangkan, sebagai Zona Integritas, yaitu :

**Tabel Hasil Evaluasi Zona Integritas Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>SKPD</b>
1	Inspektorat
2	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Perhubungan
5	Sekretariat Daerah
6	Badan Pengelola Keuangan dan Asset
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Kecamatan Pelaihari
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Pada tahun 2021** telah dilakukan penilaian terhadap 11 SKPD, dari 11 SKPD tersebut yang memenuhi kriteria nilai baik sebanyak 7 SKPD (63,63%) tetapi yang diusulkan ke Kementerian PANRB untuk penilaian oleh TPN sebanyak 5 untuk WBK dan 1 untuk WBBM dari hasil penilai Kementerian PAN RB belum ada SKPD yang lolos sebagai Zona Integritas. Berikut tabel hasil penilaian Zona Integritas terhadap 11 SKPD:

**Data hasil penilaian Zona Integritas Tahun 2021**

No	SKPD	NILAI	USULAN
1	Sekretariat Daerah	87,45	WBK
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,61	WBK
3	Dinas Perhubungan	75,25	WBK
4	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	81,85	WBK
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	97,13	WBBM
6	Inspektorat	89,61	-
7	Kecamatan Pelaihari	88,38	WBK
8	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	-
9	Dinas Kesehatan	0	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	-
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	-

*Sumber Data: hasil revidi tahun 2021*

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Kendala- Kendala yang dihadapi dalam rangka penilaian Zona Integritas, yaitu :

- 1) Kurangnya koordinasi internal SKPD terhadap penyediaan dokumen;
- 2) Lambatnya SKPD untuk pemenuhan data;
- 3) Kurangnya kompetensi SDM baik penilai atau yang dinilai;

Solusi:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD;
- 2) Dilakukan pendampingan untuk pemenuhan data;
- 3) Melakukan Pembelajaran Kantor Sendiri (PKS).

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Zona Integritas antara lain:

- a. Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan dan pemenuhan data.

### **Sasaran 7 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD**

**Indikator : Persentase SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP “BB” dengan target 100%**

**Tahun 2020**, untuk mencapai indikator ini dilakukan kegiatan Hasil evaluasi SAKIP terhadap 40 (empat puluh) SKPD. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah Auditor sebanyak 10 orang.

Dari hasil hasil evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020**

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
7	A	17,5	Memuaskan
30	BB	75	Sangat Baik
3	B	7,5	Baik

*Sumber data : hasil evaluasi SAKIP tahun 2020*

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 pada 40 SKPD adalah 92,5%, yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh SKPD) dengan kriteria Memuaskan dan Sangat Baik

**Sedangkan Tahun 2021**, hasil evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65% yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) SKPD dengan kriteria Memuaskan dan Sangat Baik, dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Jumlah SKPD	Kategori	Persentase	Interpretasi
9	A	22,5%	Memuaskan
17	BB	42,5%	Sangat Baik
10	B	25%	Baik
3	CC	7,5%	Cukup (memadai)
1	C	2,5%	Kurang

*Sumber data : hasil evaluasi SAKIP tahun 2021*

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP "BB"	75 (BB)	65%	65%

Pada Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui Program Pendampingan dan Asistensi dengan Sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp124,367,890 dan terealisasi sebesar Rp74,666,000 atau 60,04% dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah Auditor sebanyak 10 orang.

Kendala-Kendala dalam rangka dalam rangka melakukan evaluasi SAKIP antar lain:

- 1) Belum maksimalnya SKPD dalam penyusunan laporan;
- 2) Masih kurangnya pemahaman penyusun SAKIP;

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memaksimalkan dalam penyusunan laporan;
- 2) Memberikan pendampingan kepada penyusun laporan SKPD;
- 3) Melakukan layanan coaching clinic kepada SKPD

Rencana Aksi ke depan:

- 1) Melakukan Bimbingan Teknis kepada penyusunan SAKIP SKPD.



Kegiatan SAKIP 2021

**Sasaran 8 : Meningkatnya SKPD sebagai Zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**

**Indikator : Jumlah unit pelayanan publik terpilih sesuai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan target 3 SKPD.**

**Pada Tahun 2020**, untuk mencapai sasaran ini Target SKPD yang ditunjuk adalah sebanyak 3 SKPD, tetapi terealisasi sebanyak 1 SKPD (33,33%), yaitu **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut** dan telah dilaksanakan Pencangan SKPD yang ditunjuk.

**Pada Tahun 2021**, untuk mencapai sasaran ini belum ada SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas, sehingga nilai capai ini adalah 0%.

Sampai tahun 2021 SKPD yang dicanangkan telah mencapai 11 SKPD sehingga capaian sebesar 73,34% dibanding dengan Target Renstra sebanyak 15 SKPD.

Berikut SKPD yang telah ditunjuk dan dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Melayani sampai dengan Tahun 2021.

**Tabel SKPD Zona Integritas Tahun 2021**

No	SKPD
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Kecamatan Pelaihari
4	Dinas Perhubungan
5	Sekretariat Daerah
6	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Inspektorat



9	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Dinas Kesehatan (RSUD H. Boejasin Pelaihari)
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

*Sumber data :Hasil Pencanangan Zona Integritas Tahun 2021*

#### 4. Eselon III (Sekretaris)

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2019-2023 yang telah disusun Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 3 (tiga) sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

**Pada Tahun 2020** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu:

- 1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp.1.135.748.376,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.021.904.063,00 (89.98%)
- 2) Program Pemenuhan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan 4 (empat) kegiatan yaitu dengan anggaran Program sebesar Rp.443.917.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.365.398.358,00 (82.31%)
- 3) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan dengan anggaran Rp.15.000.000,00 namun tidak ada realisasi karena adanya wabah covid-19, sehingga kegiatan yang melibatkan atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari.

**Sedangkan Tahun 2021** untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program dan Kegiatan, yaitu:

- 1) Program Penunjang Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp10,101,067,105,- dan terealisasi sebesar Rp8.844.200.502 (87.56%)
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan 2 (dua) terdiri dari kegiatan dengan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp645.459.370,- dan terealisasi sebesar Rp 345.173.714 (53.48%)

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 2 (tiga) kegiatan dengan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan anggaran Program sebesar Rp559.052.700,- dan terealisasi sebesar Rp439.534.900 (78.62%).

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 13 orang.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 3 (tiga) Sasaran dengan 6 (enam) Indikator sasaran, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran	1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	1. Predikat SAKIP	A	A (87,55)	100%
		2. Nilai RB SKPD	A	AA (92,88)	102,84%
		3. Nilai ZI SKPD	A	A (89,61)	100%
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	1. Persentase Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	100%	100%	100%
		2. Tingkat Kapasitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		3. Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100%	100%	100%

**Sasaran 9 : Meningkatkan Kelancaran Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran**  
**Indikator 1 : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu**

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Pada Tahun 2021 untuk mencapai target indikator ini telah dilakukan melalui kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan keuangan, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor Tahun 2021

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	Mesin Alkon/Pompa Air	1	Buah
2	Alat Ukur Berupa Hammer Test (Alat Uji Beton)	4	Unit
3	Lemari Arsip	1	Set
4	CCTV 8 Channel	1	Set
5	Kursi Rapat	12	Buah
6	Sofa Ruang Inspektur	1	Set
7	Sofa Ruang Tamu	1	Set
8	Meja Rapat	4	Buah
9	Gordyn	90	Meter
10	AC Split 2 PK	1	Unit
11	AC Split 1.5 PK	10	Unit

12	Tandon Air	1	Buah
13	UPS 1200 VA	7	Unit
14	Mic Wirelles Podium	3	Set
15	Speaker Coloumn (Loudspeaker)	2	Set
16	Televisi 65 Inchi	1	Buah
17	Televisi 70 Inchi	1	Buah
18	Amplifier	2	Buah
19	Mixer Audio	2	Buah
20	Camera Conference	1	Set
21	Layar Proyektor	2	Buah
22	Telephone Antar Ruangan (PABX)	1	Set
23	Personal Computer	7	Unit
24	Laptop (Notebook)	4	Unit
25	Hardisk External	2	Buah
26	Printer	3	Buah
27	Printer Multi Fungsi	2	Buah
28	Menara Tandon Air	1	Buah
29	Penambahan Daya Listrik	1	Paket
30	Pembuatan Background dan meja Resepsionis	44	Meter

- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor berupa perbaikan ruang WC dan perbaikan atap.
- 4) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan

dan Pembangunan.

- 5) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Saber Pungli.
- 6) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait MCP Korsupgah.
- 7) Kegiatan terkait layanan surat menyurat.
- 8) Pengadaan Aset berupa bangunan Gedung Baru yang anggaran berasal dari Dinas PUPRP.
- 9) Kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan asset berupa sebagian Parkiran Mobil Dinas dan Mushola

**Indikator 2 : Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Adminstrasi Perkantoran	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%

Sedangkan untuk Tahun 2021 juga telah tercapai 100%, Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Kepegawaian dan Perencanaan Diklat, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) terhadap Pegawai sebanyak 43 orang, kenaikan pangkat 2 orang, gaji berkala 1 orang, dan kegiatan terkait tugas dan fungsi Kesekretariatan.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pembayaran TPP berbasis *e-kita* secara online.
- 3) Kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan diklat, baik yang dilakukan melalui zoom atau langsung melalui Lembaga pemerintah.
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan absen baik waktu masuk dan pulang kantor serta mentaati apel setiap hari di kantor.
- 5) Kegiatan yang berhubungan dengan penilaian angka kredit Auditor melalui system aplikasi Sibijak.

## **Sasaran 10 : Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD**

### **Indikator 1 : Predikat SAKIP**

Pada Tahun 2020 Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 86,6 dengan katagori A (memuaskan).

Sedangkan tahun 2021 nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 87,55 dengan katagori A (memuaskan) sehingga nilai capaian adalah (100%), artinya ada peningkatan terkait hasil evaluasi SAKIP dari tahun sebelumnya.

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	Predikat SAKIP	A	A (87,55)	100%

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Bagi seorang pimpinan, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sampai dengan saat penilaian SAKIP untuk Inspektorat dapat Nilai A. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi dari hasil penilaian SAKIP tahun 2021 bahwa SKPD Inspektorat Kab Tanah Laut mendapat Nilai "A". (memuaskan).

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen.

- 1) Perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.

- 2) Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi Pelaporan kinerja
- 3) Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, sedangkan
- 4) Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi,
- 5) Untuk pencapaian kinerja, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

## **Sasaran 10 : Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD**

### **Indikator 2 : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) SKPD**

Pada Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sehingga tahun 2020 RB Inspektorat mendapatkan nilai 92,88 dengan katagori AA (sangat memuaskan) Sehingga diketahui bahwa nilai capaian RB adalah (103,2%) dari target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Amanat Mentteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sehingga tahun 2020 RB Inspektorat mendapatkan nilai 95,52 dengan katagori AA (sangat memuaskan) Sehingga diketahui bahwa nilai capaian RB adalah (102,84%) dari target yang ditetapkan.

Nilai Tahun 2021 meningkat sebesar 0,97 dibandingkan tahun 2021, artinya ada peningkatan terkait hasil evaluasi RB dari tahun sebelumnya.

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	Nilai RB SKPD	A	AA (92,88)	102,84%

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area Perubahan, yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Pengawasan;
- 7) Akuntabilitas Kinerja dan
- 8) Kualitas Pelayanan Publik.

## **Sasaran 10 : Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD**

### **Indikator 3 : Nilai Zona Integritas (ZI) SKPD**

Pada tahun 2020 Inspektorat telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas korupsi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa nilai Zona Integritas (ZI) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 88,43 dengan katagori A (memuaskan) sehingga nilai capaian adalah (100%).

Sedangkan pada tahun 2021 Inspektorat telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas korupsi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa nilai Zona Integritas (ZI) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 89,61 dengan katagori A (memuaskan) sehingga nilai capaian adalah (100%).

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan SKPD	Nilai ZI SKPD	A	A (89,61)	100%

Dalam rangka pelaksanaan Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Penganangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga diikuti dengan Penganangan dan Penunjukan SKPD yang terpilih sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut termasuk SKPD yang menangani pelayanan dan termasuk 5 SKPD yang terpilih untuk dinilai Kementerian PANRB.



Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

### **Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan**

#### **Indikator 1 : Persentase Perencanaan SDM Pengawasan yang bersertifikat**

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	Persentase Perencanaan SDM Pengawasan yang bersertifikat	100%	100%	100%

Dari Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebanyak 24, terdiri dari Auditor sebanyak 18 Orang dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak 7 Orang semuanya telah memiliki sertifikat yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional tersebut. Hal yang menjadi kendala adalah masih kurangnya jumlah APIP daripada kebutuhan yang diperlukan.

**Tabel Realisasi Diklat yang bersertifikat Penjenjangan Tahun 2021**

Uraian	Rencana	Realisasi	%
Auditor Madya	1	1	100
P2UPD Muda	1	1	100
P2UPD Pertama	1	1	100
Auditor Muda	3	3	100
Auditor Terampil	2	2	100

Kendala- kendala dalam melaksanakan indikator ini adalah :

- Jadwal Diklat gagal karena pandemik.

Solusi

- Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana Diklat
- Diklat dilakukan melalui zoom.

## Rencana Aksi

- Membuat perencanaan Diklat dengan menyesuaikan kalender diklat

### Indikator 2 : Tingkat Kapabilitas Apip

**pada Tahun 2020** Inspektorat kabupaten tanah Laut dalam rangka penyusunan PKPT telah berbasis kinerja, dan sesuai hasil *Quality Assurance* terhadap Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat telah mencapai Level 3. (100%)

**Tabel Nilai Kapabilitas APIP**

Target Level	Realisasi	Capaian
3	3	100%

*Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP*

**Sedangkan pada Tahun 2021** Inspektorat kabupaten tanah Laut dalam rangka penyusunan PKPT telah berbasis kinerja, dan sesuai hasil *Quality Assurance* terhadap Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat telah mencapai Level 3. (100%)

Nilai capaian ini diukur melalui indikator Tingkat Kapasitas APIP dengan target Level 3.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	Tingkat Kapasitas APIP	Level 3	Level 3	100%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan yang akuntabel Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penilaian levelling APIP :

- Kurangnya pemahaman antara Auditor dan P2UPD terkait pelaksanaan pengawasan;
- Belum maksimalnya aparat pengawas dalam pembuatan Kendali Mutu dan pelaksanaan Reviu berjenjang;
- Belum dilaksanakannya secara menyeluruh SOP Pengawasan yang telah diterbitkan;

Solusi :

- Memberikan pemahaman kepada Auditor dan P2UPD terkait pelaksanaan pengawasan;
- Memaksimalkan pelaksanaan PKS terkait pengisian dan pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan memaksimalkan Pelaksanaan Reviu Berjenjang;
- Melakukan pemahaman kepada seluruh APIP untuk selalu memedomani SOP Pengawasan.

### **Indikator 3 : Presentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan.**

Tahun 2021, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Penunjang Pemerintah Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran kegiatan sebesar Rp.168.207.520 dan terealisasi sebesar Rp.117.728.050 atau 69.98%. Sesuai dengan rencana Diklat untuk Diklat yang berhubungan dengan pengawasan telah terealisasi 100%, dan juga terdapat diklat yang direncanakan oleh Badan Diklat Kabupaten Tanah Laut yang sifatnya kepesertaan.

Pada Tahun 2021 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan melakukan Diklat yang berhubungan dengan pengawasan.

Nilai capaian ini diukur melalui indikator Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan	Persentase Perencanaan Diklat Aparatur yang direalisasikan	100%	100%	100%

Secara rinci realisasi Diklat Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada Peta Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD sebagai berikut :

1. Diklat Audit Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)
2. Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern Di Lingkungan APIP
3. Diklat Pembentukan Auditor Terampil
4. Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama
5. Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional PPUPD
6. Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa
7. Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya
8. Diklat Audit Investigatif
9. Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa
10. Bimbingan teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
11. Bimbingan Teknis terkait Evaluasi Zona Integritas (ZI)

**Tabel Realisasi Sertifikat Diklat Tahun 2021**

Uraian	Rencana	Realisasi
Diklat Penjenjangan Auditor	4	4
Diklat Kompetensi Audit	4	4
Diklat audit lainnya	3	3
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**a. Eselon IV (Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan)**

Kinerja Strategis Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan tahun 2021 ada 6 dengan indikator 6 buah, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisir Temuan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen LHP	60 LHP	61 LHP	101.67
2	Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi oleh KPK	Jumlah Laporan Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh KPK yang difasilitasi	3 Laporan	3 Laporan	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Melaksanakan Fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli	Jumlah Laporan kegiatan Satgas Saber Pungli yang difasilitasi	4 Laporan	5 Laporan	125
4	Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindak Lanjuti (Eksternal dan Internal)	60 Objek	71 Objek	118.34
5	Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Laporan kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100
6	Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	10 SKPD	10 SKPD	100
7	Mengumpulkan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	Jumlah data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	170 dokumen	170 dokumen	100

#### **Sasaran 1 : Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan**

**Indikator : Jumlah Inventarisasi Temuan hasil pengawasan yang di lakukan terhadap dokumen LHP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisir Temuan hasil pengawasan yang di lakukan terhadap dokumen LHP	60 LHP	61 LHP	101.67

Pada tahun 2020 untuk dari target 60 Dokumen LHP yang terbit, Dengan realisasi LHP sebanyak 58 dokumen (96, 6%) yang terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal, dengan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian evaluasi dan pelaporan dan Auditor sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. untuk kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Tahun 2020 tidak dianggarkan.

Sedangkan untuk tahun 2021 dari target 60 Dokumen LHP yang terbit,

Dengan realisasi LHP sebanyak 61 dokumen (101.67%) yang terdiri dari 280 (dua ratus delapan puluh) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal, dengan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian evaluasi dan pelaporan dan Auditor sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. untuk kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Tahun 2021 tidak dianggarkan.

SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian evaluasi dan pelaporan dan Auditor sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada.

**Sasaran 2 : Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi oleh KPK**

**Indikator : Jumlah Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh KPK yang difasilitasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2	Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi oleh KPK	Jumlah Laporan Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi oleh KPK yang difasilitasi	3 Laporan	3 Laporan	100%

Pada tahun 2020 target pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi oleh KPK sebanyak 2 (dua) laporan kegiatan dan teralisasi 2 (dua) laporan kegiatan (100%). Untuk mencapai indikator ini SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi oleh KPK sebanyak 3 (tiga) laporan kegiatan dan teralisasi 3 (tiga) laporan kegiatan (100%). Sama dengan tahun sebelumnya untuk mencapai indikator ini SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.



*Kegiatan Korsupgah Tahun 2021*

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi KPK terkait penyelesaian temuan hasil pengawan baik yang dilakukan oleh pemeriksa Eksternal (BPK RI) dan Internal (Itjen dan BPKP).

### **Sasaran 3 : Melaksanakan Fasilitas kegiatan Satgas Saber Pungli**

**Indikator : Jumlah kegiatan Satgas Saber Pungli yang difasilitasi.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Melaksanakan Fasilitas kegiatan Satgas Saber Pungli	Jumlah Laporan kegiatan Satgas Saber Pungli yang difasilitasi	4 Laporan	5 Laporan	125

Pada tahun 2020 target Fasilitas kegiatan Satgas Saber Pungli sebanyak 5 (lima) Kali kegiatan dan teralisasi 3 Kali kegiatan (60%) karena terkendala pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan berkurangnya kegiatan Satgas Saber Pungli secara signifikan, sehingga jumlah fasilitas kegiatan ikut terdampak dan berkurang.

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Saber Pungli dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 792.638.400,00 terealisasi sebesar Rp. 185.895.000,00 (23.45%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Fasilitas kegiatan Satgas Saber Pungli sebanyak 4 (empat) Laporan kegiatan teralisasi 5 (lima) Laporan kegiatan (125%).

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp306.284.300 teralisasi sebesar Rp264.159.900 (95.01%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.



*Kegiatan Saberpungli tahun 2021*

Pada Tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut ditunjuk sebagai kota bebas pungli dan mendapatkan penghargaan terbaik ke 4 sebagai Kabupaten/ Kota Bebas pungutan liar dari Menko Polhukam.

**Sasaran 4 : Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan**

**Indikator : Jumlah temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindak Lanjuti (Eksternal dan Internal)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4	Melaksanakan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindak Lanjuti (Eksternal dan Internal)	60 Objek	71 Objek	118.34

Pada tahun 2020 target dari target 60 (enam puluh) objek pemeriksa terealisasi 58 (lima puluh delapan) Objek Pemeriksa yang terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal.

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.106.040.000,00 terealisasi sebesar Rp57.493.300,00 (40.95%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 dari target 60 (enam puluh) objek pemeriksa terealisasi 71 (tujuh puluh satu) Objek Pemeriksa yang terdiri dari 280 (dua ratus delapan puluh) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi



Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan jumlah anggaran sebesar Rp.119.573.806,- terealisasi sebesar Rp.54.314.430,- (45.42%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.



*Kegiatan Tindak Lanjut Tahun 2021*

**Sasaran 5 : Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**

**Indikator : Jumlah kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang difasilitasi.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5	Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah laporan Kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang difasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	100%

Pada tahun 2020 target fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) laporan kegiatan dan terealisasi 2 (dua) laporan kegiatan (66,67%). Karena terkendala pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan berkurangnya kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara signifikan, sehingga jumlah fasilitasi kegiatan ikut terdampak dan berkurang.

. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.460.266.400,00 terealisasi sebesar Rp.129.161.200,00 ( 28.06%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target fasilitasi kegiatan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebanyak 2 (tiga) kali kegiatan dan terealisasi 2 (dua) kali kegiatan (100%).

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.89.965.000,00 terealisasi sebesar Rp.81.775.000,00 (90.90%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan sinergitas pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di kabupaten Tanah Laut oleh TP4D, dengan anggota dari APH (Kejaksaan dan Kepolisian) dan Bupati Wakil Bupati, Kepala SKPD, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Tim Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan dimaksudkan untuk pendampingan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Tanah Laut.



*Kegiatan Sinergitas 2021*

#### **Sasaran 6 : Melaksanakan fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP**

**Indikator : Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
6	Melaksanakan Fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP	10 SKPD	10 SKPD	100%

Pada Tahun 2020 Jumlah SKPD yang difasilitasi Penilaian Maturitas SPIP 10 SKPD (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.175.800,00 terealisasi sebesar Rp. 74.972.100,00 (95.90%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Auditor sebanyak 25 orang.

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan penilaian baseline SKPD sebagai bagian dari langkah konkrit menuju peningkatan nilai maturitas SPIP, dari hasil penilaian baseline maturitas SPIP terhadap 10 SKPD (Inspektorat, Dinas Peternakan, Bappeda, Disnakerin, DPRKPLH, Kesbangpol, Dinas Pariwisata, DKPP, Diskopdag, BPKAD), selain itu juga telah dilaksanakan Kegiatan dalam rangka fasilitasi Penilaian Maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pendampingan penyusunan Risk Register yang dilakukan di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV dari 40 SKPD.

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp124.367.890 terealisasi sebesar Rp74.666.000,- (60.04%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Auditor sebanyak 25 orang.



*Kegiatan Risk Register Tahun 2021*

**Sasaran 7 : Mengumpulkan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskan kepada KPK**

**Indikator : Jumlah data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
7	Mengumpulkan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	Jumlah data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dan meneruskannya kepada KPK	170 dokumen	170 dokumen	100%

Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan pengumpulan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dari 8 (delapan) SKPD terdiri dari BKPSDM, INSPEKTORAT, DPMD, UKPBJ SETDA, BAPPEDA, DPMPTSP, BPKAD, BAPENDA. Dengan jumlah dokumen 170 dan diteruskan kepada KPK

Data data dokumen tersebut terdiri dari Area Monitoring Center for Prevation (MCP) :

1. Area perencanaan dan penganggaran
2. Area pengawasan APIP
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa
4. Area Manajemen Aset Daerah
5. Area manajemen ASN
6. Area Pengawasan Dana Desa
7. Area Perizinan
8. Area Perizinan

Pada tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut mendapatkan urutan nomor 2 sekalimantan selatan dengan nilai 93

Untuk indikator ini tidak didukung dengan anggaran, Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### **b. Eselon IV (Kasubag Adminitrasi Umum)**

Kinerja Strategis Kasubag Administrasi Umum tahun 2021 ada 5 dengan indikator 5 buah, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melakukan layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	8 Layanan	8 Layanan	100%

2	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sapras,	Jumlah Sapras, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	110 buah	47 buah	43 %
4	Melaksanakan Pengelolaan Arsip	Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	1800 buah	2778 buah	154 %
5	Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat	24 org	23 org	96%

### **Sasaran 1 : Melakukan Layanan Administrasi Perkantoran**

**Indikator : Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Melakukan layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	8 Layanan	8 Layanan	100%

Pada tahun 2020 target Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP sebanyak 10 buah kegiatan teralisasi 10 buah (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.135.748.376,00 teralisasi sebesar Rp1.021.904.063,00 (89.98%) Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Kegiatan Penyediaan Rapat- rapat konsultasi dan koordinasi;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD

SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP sebanyak 8 buah kegiatan teralisasi 8 buah (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.101.121.105,- teralisasi sebesar Rp8.844.200.502,- (87.56%) Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah;
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

daerah;

Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

**Tabel layanan Administrasi Perkantoran**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Layanan Tamu	726	Tahun
2	Layanan surat menyurat	2778 buah	Surat masuk 1693 Surat keluar 1085
3	Layanan kebersihan kantor	12	bln
4	Layanan keamanan lingkungan kantor	12	bln
5	Layanan administrasi Pengaduan	5	buah
6	Layanan administrasi permintaan bebas temuan	56	buah
7	Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi	12	bln
8	Fasilitasi kegiatan PKS	12	bln

**Sasaran 2 : Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan**

**Indikator : Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	25 Dokumen	25 Dokumen	100

Pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu sebanyak 28 dokumen kegiatan teralisasi 28 dokumen (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Penyusunan laporan keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 5.163.200,00 (86.05%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP sebanyak 20 dokumen terealisasi 20 dokumen (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.32.230.326,- teralisasi sebesar Rp. 5.163.200,00 (86.05%). Sedangkan SDM yang

mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

**Tabel layanan Dokumen Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2021**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Data DUK	2	revisi
2	Data Naik pangkat dan berkala	3	org
3	Data Pensiun	0	org
4	Laporan Triwulan	4	dok
5	Laporan keuangan bulan	12	dok
6	Laporan keuangan semesteran	2	dok
7	Laporan keuangan akhir tahun	1	Dok

**Sasaran 3 : Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

**Indikator : Jumlah Sarana dan prasarana, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan.**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3	Melaksanakan Pemeliharaan Sapras,	Jumlah Sapras, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	110 buah	47 buah	43 %

Pada tahun 2020 target Jumlah Sarana dan prasarana, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebanyak 100 buah kegiatan yang terealisasi 80 buah (80%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp329.527.500,00 terealisasi sebesar Rp261.619.030,00 (79.39%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Sarana dan prasarana, yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebanyak 110 buah kegiatan yang terealisasi 47 buah (43%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp132.200.000,- terealisasi sebesar Rp56.729.320,- (42.91%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang.



**Sasaran 4 : Melaksanakan Pengelolaan Arsip****Indikator : Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4	Melaksanakan Pengelolaan Arsip	Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi	1800 buah	2778 buah	154 %

**Pada tahun 2020** target Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi sebanyak 2.250 surat kegiatan yang terealisasi 2.166 surat (96%) terdiri dari Surat masuk 1175 Surat keluar 991. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SDM sebanyak 5 (lima) orang.

Sedangkan **pada tahun 2021** target Jumlah Surat yang Diarsipkan Sesuai Klasifikasi sebanyak 1800 surat kegiatan yang terealisasi 2778 surat (154%) terdiri dari Surat masuk 1.693 Surat keluar 1.085. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SDM sebanyak 5 (lima) orang. Dan untuk pengarsipan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan telah diarsipkan sesuai SOP telah dikirim ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tanah Laut.

**Sasaran 5 : Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat****Indikator : Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5	Pemenuhan SDM Pengawasan yang bersertifikat	Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat	24 org	23 org	96%

Pada tahun 2020 target Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat sebanyak 20 Orang kegiatan yang terealisasi sebanyak 19 Orang (95%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur dengan jumlah anggaran sebesar Rp.114.390.000,00 terealisasi sebesar Rp.103.779.328,00 (90.79%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan diklat ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian Administrasi Umum dan Auditor sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah SDM Pengawasan yang bersertifikat sebanyak 24 Orang kegiatan yang terealisasi sebanyak 23 Orang (96%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis



implementasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.168.207.520,- terealisasi sebesar Rp.117.728.050,- (69.99%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan diklat ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian Administrasi Umum dan Auditor sebanyak 24 orang.

**Tabel Realisasi Sertifikat Diklat Tahun 2021**

<b>Uraian</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>
Diklat Penjenjangan Auditor	4	4
Diklat Kompetensi Audit	4	4
Diklat audit lainnya	3	3
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**c. Eselon IV (Kasubag Perencanaan)**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan serta menyusun rencana anggaran.

Kinerja Strategis Kasubag Perencanaan tahun 2021 ada 6 dengan indikator 6 buah, sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 Dokumen	25 Dokumen	104.16%
2.	Melaksanakan Fasilitas PKPT	Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT	115 LHP	115 LHP	100%
3.	Melaksanakan Fasilitas revidi LKPD	Laporan Hasil Revidi LKPD Sesuai SAP	1 Dok	1 Dok	100%
4.	Melaksanakan fasilitas Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan	41 Dokumen	41 Dokumen	100%
5.	Melakukan Fasilitas Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi	5 Kasus	5 Kasus	100 %
6.	Melaksanakan Fasilitas Evaluasi RB ZI	Jumlah SKPD yang dievaluasi RB dan ZI	RB 40 ZI 11	40 SKPD 11 SKPD	100% 100%

**Sasaran 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan**

**Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 Dokumen	25 Dokumen	104.16%

Pada tahun 2020 target Penyusunan Dokumen Perencanaan sebanyak 8 (delapan) Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 8 (delapan) Dokumen (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.18.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.612.800,00 (70.07%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 4 (empat) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Penyusunan Dokumen Perencanaan sebanyak 24 (dua puluh empat) Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 25 (dua puluh enam) Dokumen (104.16%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp67.617.746,- terealisasi sebesar Rp.39.217.230,- (58%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang. Berikut data dokumen perencanaan yang disusun.

**Tabel Dokumen Perencanaan Tahun 2021**

No	Nama Layanan	Jumlah	Keterangan
1	Renja	2	dok
2	RKA	2	dok
3	DPA	2	dok
4	Laporan Realisasi kinerja	12	dok
5	Laporan Kinerja Triwulan	4	dok
6	PK	1	revisi
7	LPPD	1	dok
8	Laporan Kinerja	1	dok

**Sasaran 2 : Melaksanakan Fasilitas PKPT****Indikator : Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Melaksanakan Fasilitas PKPT	Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT	102 LHP	115 LHP	112.74%

Pada tahun 2020 target Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT sebanyak 102 LHP kegiatan yang terealisasi sebanyak 98 LHP (96%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan jumlah anggaran sebesar Rp.596.709.300,00 terealisasi sebesar Rp.409.599.300,00 (68.64%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah LHP yang terbit sesuai PKPT sebanyak 102 LHP kegiatan yang terealisasi sebanyak 115 LHP (112.74%%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.589.418.870,- terealisasi sebesar Rp.334.573.664,- (56.76%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 24 orang.

**Sasaran 3 : Melaksanakan Fasilitas reviu LKPD****Indikator : Laporan Hasil Reviu LKPD Sesuai SAP**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3.	Melaksanakan Fasilitas reviu LKPD	Laporan Hasil Reviu LKPD Sesuai SAP	1 Dok	1 Dok	100%

Pada tahun 2020 target Laporan Hasil Reviu LKPD Sesuai SAP sebanyak 1 Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 Dokumen (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan jumlah anggaran sebesar Rp.596.709.300,00 terealisasi sebesar Rp.409.599.300,00 (68.64%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Laporan Hasil Reviu LKPD Sesuai SAP sebanyak 1 Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 Dokumen (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan

Pengawasan Internal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.589.418.870,- terealisasi sebesar Rp.334.573.664,- (56.76%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 24 orang.

**Sasaran 4 : Melaksanakan fasilitasi Evaluasi SAKIP SKPD**

**Indikator : Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Melaksanakan Fasilitasi Evaluasi SAKIP SKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan</li> </ul>	40 Dokumen	40 Dokumen	100%

Pada tahun 2020 target Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan sebanyak 40 Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 40 Dokumen (100%), dokumen ini merupakan pendukung Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SDM sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian perencanaan dan Auditor sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Dokumen Evaluasi SAKIP SKPD sesuai ketentuan sebanyak 40 Dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 40 Dokumen (100%), dokumen ini merupakan pendukung Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan jumlah anggaran sebesar Rp.589.418.870,- terealisasi sebesar Rp.334.573.664,- (56.76%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 24 orang.

Pada Tahun 2021 hasil evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65% yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) SKPD dengan kriteria Memuaskan dan Sangat Baik, dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
9	A	22,5%	Memuaskan
17	BB	42,5%	Sangat Baik
10	B	25%	Baik

3	CC	7,5%	Cukup (memadai)
1	C	2,5%	Kurang

#### **Sasaran 5 : Melakukan Fasilitasi Kasus Pengaduan Masyarakat**

**Indikator : Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5.	Melakukan Fasilitasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi	5 Kasus	5 Kasus	100 %

Pada tahun 2020 target Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi sebanyak 6 (enam) kasus kegiatan yang terealisasi sebanyak 8 (delapan) kasus (133%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SDM sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi sebanyak 5 (lima) kasus kegiatan yang terealisasi sebanyak 5 (lima) kasus (100%). Untuk mencapai indikator ini didukung dengan SDM sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

#### **Sasaran 6 : Melaksanakan Fasilitasi Evaluasi RB dan ZI**

**Indikator : Jumlah SKPD yang dievaluasi RB dan ZI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
6.	Melaksanakan Fasilitasi Evaluasi RB ZI	Jumlah SKPD yang dievaluasi RB dan ZI	RB 40 ZI 10	40 SKPD 10 SKPD	100% 100%

tahun 2020 target Jumlah SKPD yang dievaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sebanyak 40 (empat puluh) SKPD. Atau (100%) Sedangkan untuk Zona Integritas (ZI) sebanyak 10 (sepuluh) SKPD kegiatan yang terealisasi untuk Zona Integritas (ZI) sebanyak 10 (sepuluh) SKPD (100%)

Sedangkan Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (GG) dengan :

- 1) Kegiatan Evaluasi Reformasi dan Birokrasi dengan Pagu anggaran

Rp18.646.800,- dan realisasi Rp12.470.000,-(66,87%)

- 2) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) dengan pagu Rp150.000,- dan realisasi Rp150.000,- (100%).

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan SDM sebanyak 4 (empat) orang di sub bagian perencanaan dan Auditor sebanyak 25 orang.

Sedangkan pada tahun 2021 target Jumlah SKPD yang dievaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sebanyak 40 (empat puluh) SKPD. Atau (100%) Sedangkan untuk Zona Integritas (ZI) sebanyak 10 (sepuluh) SKPD kegiatan yang terealisasi untuk Zona Integritas (ZI) sebanyak 10 (sepuluh) SKPD (100%)

Untuk mencapai indikator ini didukung dengan Sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.124.367.890,- terealisasi sebesar Rp.74.666.000,- (60.04%). Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang di sub bagian perencanaan dan APIP sebanyak 24 orang

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

### **1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021**

Anggaran di Inspektorat terdiri dari 2 (dua) Jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri atas 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Subkegiatan, Belanja Modal ini dipergunakan untuk pengadaan barang dan pengadaan bangunan.

Berikut adalah Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 :

**Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi keuangan (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>A.</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b><u>10,101,121,105</u></b>	<b><u>8,844,200,502</u></b>	<b><u>87.56</u></b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b><u>67,617,746</u></b>	<b><u>39,217,230</u></b>	<b><u>58.00</u></b>
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8,138,420	5,492,400	67.49

	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,230,326	28,724,830	89.12
	3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,249,000	5,000,000	18.35
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>		<b>8,379,605,573</b>	<b>7,446,138,419</b>	<b>88.86</b>
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,354,270,197	7,422,970,289	88.85
	2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,335,376	23,168,130	91.45
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>		<b>189,624,520</b>	<b>136,124,450</b>	<b>71.79</b>
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,417,000	18,396,400	85.90
	2.	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	168,207,520	117,728,050	69.99
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>		<b>655,100,974</b>	<b>581,261,803</b>	<b>88.73</b>
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,855,690	79,417,000	97.02
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,353,564	162,657,600	81.19
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,378,320	15,522,927	42.67
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,818,400	11,301,600	67.20
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,695,000	312,362,676	97.71
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>522,932,410</b>	<b>475,399,450</b>	<b>90.91</b>
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	522,932,410	475,399,450	90.91
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>154,039,882</b>	<b>109,329,830</b>	<b>70.98</b>
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,293,600	2,564,400	59.73
	2.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	91,820,600	56,613,373	61.66
	3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57,925,682	50,152,057	86.58

<b>7</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>132,200,000</b>	<b>56,729,320</b>	<b>42.91</b>
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	69,000,000	38,653,520	56.02
	2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	63,200,000	18,075,800	28.60
<b>B.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b><u>645,459,370</u></b>	<b><u>345,173,714</u></b>	<b><u>53.48</u></b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>589,418,870</b>	<b>334,573,664</b>	<b>56.76</b>
	1. Pengawasan kinerja pemerintah daerah	173,985,134	126,323,884	72.61
	2. Pengawasan keuangan pemerintah daerah	68,458,270	34,710,950	50.70
	3. Reviu laporan kinerja	42,777,080	15,866,000	37.09
	4. Reviu laporan keuangan	69,052,620	11,791,800	17.08
	5. Pengawasan desa	115,571,960	91,566,600	79.23
	6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	119,573,806	54,314,430	45.42
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>56,040,500</b>	<b>10,600,050</b>	<b>18.91</b>
	1. Pengawasan dengan tujuan tertentu	56,040,500	10,600,050	18.91
<b>C</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b><u>559,052,700</u></b>	<b><u>439,534,900</u></b>	<b><u>78.62</u></b>
<b>1</b>	<b>Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
	1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	-	-	0.00
<b>2.</b>	<b>Pendampingan dan asistensi</b>	<b><u>559,052,700</u></b>	<b><u>439,534,900</u></b>	<b><u>78.62</u></b>
	1. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	97,661,980	81,255,000	83.20



2.	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	124,367,890	74,666,000	60.04
3.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	306,284,300	264,159,900	86.25
4.	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	30,738,530	19,454,000	63.29
<b>Jumlah Keseluruhan Program</b>		<b><u>11,305,633,175</u></b>	<b><u>9,628,909,116</u></b>	<b><u>85.17</u></b>

## 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan total anggaran sebesar Rp11,305,633,175, terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri atas 11 (sebelas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Subkegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel Sasaran Program Tahun 2021**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Program (Rp)
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat keuangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	173,985,134
				Pengawasan keuangan pemerintah daerah	68,458,270
				Pengawasan desa	115,571,960
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	124,367,890
Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-
	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan asset tertib	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu laporan keuangan	69,052,620
				Reviu laporan keuangan	69,052,620
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat/Instansi yang ditindaklanjuti	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan	306,284,300

			Pemerintahan dan Pembangunan	pemberantasan korupsi	
				Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	30,738,530
				Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	97,661,980
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan katagori tuntas ditindaklanjuti (eksternal dan Internal)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	119,573,806
Meningkatnya hasil Evaluasi RB dan ZI SKPD	Persentase SKPD dengan hasil reuiu ZI baik	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-
	Persentase Hasil Evaluasi RB SKPD dengan katagori B	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-
Meningkatnya SKPD/Unit Pelayanan Publik sebagai zona intergitas WBK	Jumlah SKPD/ unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,855,690
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,353,564
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36,378,320
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,818,400
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	319,695,000
	Persentase Pengelolaan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,293,600

	Kepegawaian yang tertib	Daerah Kabupaten/Kota			
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	91,820,600
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57,925,682
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,293,600
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	522,932,410
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	69,000,000
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	63,200,000
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	91,820,600
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	57,925,682
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8,138,420
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,230,326
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,249,000
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan	Persentase Pemenuhan SDM Pengawas yang Bersertifikat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	168,207,520
	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	-	-
	Persentase perencanaan diklat Aparatur yang direalisasikan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	

### 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 - 2021

Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 9,676,270,492,- yang terdiri dari :

#### a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut table belanja Tidak langsung tahun 2020:

**Tabel Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Belanja Gaji dan tunjangan	3.599.780.180.00	2.743.165.830.00	76.2%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.304.279.536.00	3.285.693.715.00	99.4%
	<b>Total</b>	<b>6.904.059.716.00</b>	<b>6.028.859.545.00</b>	<b>87.3%</b>

#### b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri atas 6 (enam) program yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan

Dengan adanya Wabah Covid-19, dilakukan penyesuaian Anggaran pada Tahun 2020. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 total anggaran adalah sebesar Rp.11.597.435.015,-. Pada Bulan April 2020 dilakukan Perubahan Anggaran mendahului Perubahan APBD dengan Total Anggaran sebesar Rp.9.097.351.949,-. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disahkan pada bulan Oktober 2020 Total Anggaran Inspektorat adalah sebesar RP.9.676.270.492,00 yang terdiri dari :

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 ini dipergunakan untuk membiayai Program-Program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 6 (enam) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan berikut adalah Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 :

**Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,135,748,376</b>	<b>1,021,904,063</b>	89.98%
1.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	474,000,000	455,689,977.00	96.14%
2.	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	451,861,500	378,343,946.00	83.73%
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	209,886,876	187,870,140.00	89.51%
<b>B.</b>	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>443,917,500</b>	<b>365,398,358</b>	82.31%
1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	126,618,400	81,976,630.00	64.74%
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	202,909,100	179,642,400.00	88.53%
3.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	114,390,000	103,779,328.00	90.72%
4.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	0.00%
<b>C.</b>	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>15,000,000</b>	-	0.00%
1.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	15,000,000	-	0.00%
<b>D.</b>	<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (GG)</b>	<b>450,795,600</b>	<b>416,534,300</b>	92.40%
1.	Evaluasi Reformasi Birokrasi	18,646,800	12,470,000.00	66.87%
2.	Pengawasan Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)	150,000	150,000.00	100.00%
3.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	78,175,800	74,972,100.00	95.90%
4.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)	-	-	
5.	Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	89,965,000	81,775,000.00	90.90%
6.	Saber Pungli	213,565,000	202,913,200.00	95.01%
7.	Evaluasi Kapabilitas APIP	50,293,000	44,254,000.00	87.99%
<b>E.</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	<b>24,000,000</b>	<b>17,776,000</b>	74.07%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	11,000,000	8,501,100.00	77.28%
2	Penyusunan Laporan Keuangan	6,000,000	5,163,200.00	86.05%
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	7,000,000	4,111,700.00	58.74%
<b>F.</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>702,749,300</b>	<b>482,280,200</b>	<b>68.63%</b>
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	596,709,300	409,599,300.00	68.64%
2	Inventarisasi Temuan Pengawasan	-	-	
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	106,040,000	72,680,900.00	68.54%
4	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>2,772,210,776</b>	<b>2,303,892,921</b>	<b>83.11%</b>

**Data Perbandingan Realisasi anggaran  
Tahun 2020 terhadap Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realiasasi %
2020				
1	Belanja Gaji dan tunjangan	3,599,780,180,00	2,743,165,830,00	76.2%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3,304,279,536.00	3,285,693,715,00	99.4%
3	Belanja Langsung	2,772,210,776. 00	2,303,892,921. 00	83.1%
	Total	9,676,270,492. 00	8,332,752,466,00	86.12%
4	Jumlah Program	6		
5	Jumlah Kegiatan	22		
2021				
1	Belanja Operasi	10.570.938.371,00	8.960.803.866, 00	84,77%
2	Belanja Modal	734.694.804, 00	668.105.250, 00	90,94%
	Total	11.305.633.175,00	9.628.909.116, 00	85,17%
4	Jumlah Program	3		
5	Jumlah Kegiatan	11		
6	Jumlah Subkegiatan	30		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah 11 (Sebelas) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 2 (dua) indikator dan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) indikator yang tercapai dan 4 (empat) Indikator yang tidak tercapai antara lain yaitu :

1. Indikator Sasaran IKU untuk Eselon II sebanyak 1 (satu) buah;
2. Indikator Kinerja sasaran untuk eselon III sebanyak 3 (tiga) buah

#### **B. Strategi Peningkatan Kerja**

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2021 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan ke SKPD sesuai dengan PKPT dengan berbasis resiko;
2. Mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat pencapaian target indikator kinerja hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi lainnya;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
4. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.

5. Meningkatkan kegiatan korsiupgah dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di SKPD.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelakasanaan Zona Integritas Bebas Korupsi dalam Pelayanan Publik
8. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui peningkatan levelling APIP dalam rangka menjamin mutu pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, 14 Maret 2022

Plt. Inspektur,



Drs. H. HUSEIN IRIANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 196307201985031015